



PERAN BELANJA MODAL SEBAGAI EFEK MEDIASI PADA KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

THE ROLE OF CAPITAL EXPENDITURE AS A MEDIATING EFFECT ON REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE ON ECONOMIC GROWTH OF DISTRICTS AND CITIES IN WEST KALIMANTAN PROVINCE

Indah Nuraini¹, Mustaruddin Saleh²

^{1,2} Faculty of Economics and Business, Universitas Tanjungpura

Pontianak 78124 Indonesia

Email: indah.nuraini17@gmail.com

Corresponding author: mustaruddin@ekonomi.untan.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel mediasi dengan studi kasus di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Bentuk penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa data yang bersumber dari BPS di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Teknik analisisnya menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada substruktur pertama variabel Kemandirian Keuangan dan Efektivitas Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Selanjutnya pada substruktur kedua, Kemandirian Keuangan, Efektivitas Keuangan dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa Belanja Modal mampu memediasi hubungan antara variabel Kemandirian Keuangan dan Efektivitas Keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan; Efektivitas Keuangan; Belanja Modal; Pertumbuhan ekonomi

Abstract

The aim of this research is to determine regional financial performance regarding economic growth with capital expenditure as a mediating variable with case studies in 14 districts and cities in West Kalimantan. This form of research uses descriptive with a quantitative approach. Data collection uses secondary data in the form of data sourced from BPS in 14 districts and cities in West Kalimantan. The analysis technique uses path analysis. The results of this research show that in the first sub-structure, the variables Financial Independence and Financial Effectiveness have a positive and significant effect on Capital Expenditures. Furthermore, in the second sub-structure, Financial Independence, Financial Effectiveness and Capital Expenditures have a positive and significant effect on economic growth. The research results also reveal that Capital Expenditures are able to mediate the relationship between the variables Financial Independence and Financial Effectiveness on economic growth.

Keywords: Financial Independence; Financial Effectiveness; Capital Expenditure; Economic Growth

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah. Setiap tahun pemerintah daerah selalu mempersiapkan perencanaan anggaran atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, karena anggaran pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran merupakan alat perencanaan target yang harus dicapai oleh pemerintah, serta sebagai alat untuk pengendalian alokasi sumber

dana publik yang disetujui oleh legislatif untuk nanti dibelanjakan. Realitanya *good governance* masih menghadapi banyak kendala dalam masyarakat dikarenakan opini mengenai tata kelola pemerintahan dipandang masih kurang, maka diperlukan penerapan tata kelola pemerintahan yang memiliki prosedur yang jelas diharapkan kualitas pemerintah akan semakin baik. Indikator kualitas pemerintahan yang baik yaitu pelayanan publiknya baik, angka korupsi berkurang, dan pemerintah semakin peduli dengan kepentingan masyarakatnya serta realisasi anggaran tercapai (Dwiyanto, 2005).

Kebijakan penggunaan dana diserahkan sepenuhnya kepada instansi tersebut sesuai dengan dana yang ada dan dipertanggungjawabkan melalui laporan realisasi anggaran. Upaya pencegahan penyalahgunaan dana anggaran seperti menggunakan dana anggaran untuk kebutuhan pribadi, maka diperlukanlah pengendalian keuangan yang baik. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dalam pengelolaan keuangannya harus akuntabel dan transparan atas laporan keuangannya, sehingga program yang telah ditargetkan dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan sah. Efektivitas keuangan anggaran sangat berpengaruh kinerja pemerintah di mana kinerja pemerintah dinilai baik apabila pemerintah mampu melakukan efektivitas keuangan belanja dan mampu mengidentifikasi anggaran sehingga anggaran tersebut dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Efisiensi berhubungan dengan konsep produktivitas. Sehingga dapat diketahui dengan jelas bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dengan efektif dan efisiensi anggaran belanja di Kalimantan Barat. Berdasarkan data menggambarkan bahwa kinerja penggunaan anggaran belanja pada pemerintah daerah merupakan faktor penting bagi pemerintah daerah agar dapat melakukan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Belanja daerah diperlukan untuk pemerintah daerah melakukan pembangunan guna peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah. Pencapaian realisasi belanja modal pemerintah masih belum optimal dan mengecewakan. Pesatnya pembangunan daerah yang bersumber dari alokasi belanja modal diharapkan terjadinya peningkatan kemandirian suatu daerah tersebut dalam membiayai kegiatan terutama dalam hal keuangan. Pemerintah daerah dalam mengelola belanja daerah dan belanja modal agar anggaran yang ada digunakan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam hal ini belanja pemerintah daerah sehingga tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi di Kabupaten dan Kota Di Kalimantan Barat Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang mempunyai pengertian sama dengan perkembangan ekonomi, kemajuan ekonomi, kesejahteraan ekonomi (Jhingan, 2008) adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Selain itu pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan selalu dalam ukuran persen (Sukirno, 2010). Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai

penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Rahardjo, 2013:4). Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di daerah tersebut (Tarigan, 2004).

Todaro (2003) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan membaik. Observasi inilah yang dikenal dengan “U Hypothesis” atau kurva Kuznets “U-terbalik”, karena perubahan longitudinal (time-series) dalam distribusi pendapatan. Hipotesa ini dihasilkan oleh kajian empiris yang diambil dari pola pertumbuhan sejumlah negara di dunia, bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi terjadi trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan. Lambat laun sejalan dengan pertumbuhan pembangunan ekonomi setelah mencapai tahap tertentu ketimpangan tersebut akan menghilang digantikan dengan hubungan korelasi positif antara pemerataan dan pertumbuhan. Pola tersebut timbul karena pada tahap awal pembangunan cenderung lebih dipusatkan pada sektor modern yang sedikit menyerap tenaga kerja. Sektor modern bertumbuh dengan cepat meninggalkan sektor tradisional (sektor pertanian).

PDRB adalah jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, maka nilai tambah bruto adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan (laba); semuanya belum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya (Muana, 2005). PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor bersih dalam suatu wilayah, biasanya satu tahun. Produk Domestik Regional Bruto dapat dijadikan sebagai indikator laju pertumbuhan ekonomi sektoral agar dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang menyebabkan perubahan pada pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2004). Besar kecilnya PDRB yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah tergantung oleh besarnya sumber daya alam yang telah dimanfaatkan, jumlah dan mutu sumber daya manusia, kebijaksanaan pemerintah, letak geografis serta tersedianya sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Terdapat beberapa ukuran pendapatan nasional, diantaranya: Gross National Product (GNP), Gross Domestic Product (GDP), Net National Product (NNP), dan National Income (NI) (Dumairy, 2004).

Anggaran

Sistem penganggaran lebih umum digunakan dalam perusahaan yang lebih besar, dimana teknik-teknik yang dirumuskan sering membantu manajemen. Akan yang memberikan teori tentang anggaran secara umum memberikan konsep yang sama terhadap pengertian anggaran meskipun definisi anggaran berbeda-beda. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu (Nafarin, 2010). Menurut Munandar (2010) menyatakan bahwa “Anggaran” (*budget*) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Anggaran merupakan alat bantu yang sangat penting bagi perusahaan, karena anggaran merupakan pedoman pelaksanaan kerja dan berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja yang telah dicapai perusahaan. Anggaran juga dapat digunakan

sebagai alat untuk mengembangkan ke arah yang lebih baik, dengan kata lain anggaran dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Menurut Munandar (2010) mengemukakan tiga kegunaan pokok anggaran, yaitu: a). Sebagai pedoman kerja; memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang; b). Sebagai alat pengkoordinasian kerja; sebagai alat untuk mengkoordinasikan kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk menuju ke sasaran yang telah ditetapkan; c). Sebagai alat pengawasan kerja; Membandingkan antara apa yang tertuang di dalam budget dengan apa yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, dapat dinilai apakah perusahaan telah sukses bekerja dan dapat pula diketahui sebab-sebab penyimpangan antara budget dengan realisasinya.

Belanja Modal

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut (Boediono, 1985): a). Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa; b). Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung; c). Pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment*; mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat.

Mangkoesebroto (2016) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja modal memiliki 5 (lima) kategori, yaitu: a). Belanja modal tanah. Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai; b). Belanja modal peralatan dan mesin. Belanja modal peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya; c). Belanja modal gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai; d). Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai; e). Belanja modal aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas.

Kinerja Keuangan Daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah

daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2010). Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2010).

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2010) yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian belanja. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pemerintah daerah adalah Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dan Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah, diantaranya menggunakan variabel kinerja keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer antar pemerintah, Belanja pemerintah daerah (Azhari, Zulfah & Murtala (2020); Saraswati (2019); Zulkarnaien dkk (2019); Hafidh (2013) dan Siregar (2018). Temuan hasil penelitian sebelumnya tersebut masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda namun sebagian besar menunjukkan pengaruh yang positif. Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2017) menemukan, bahwa Pendapatan Daerah saja, dan Transfer Antar Pemerintah secara signifikan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Daerah, namun Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tidak mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Antar Pemerintah dan Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Selanjutnya Asih (2018) mengungkapkan bahwa Kontribusi Pajak Daerah, PAD, Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat memperkuat hubungan antara ketiga variabel yang digunakan terhadap Belanja Daerah. Selaras dengan hasil penelitian Saraswati (2018) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2018), Analisis Pertumbuhan Pengeluaran tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Rasio Efisiensi Pengeluaran, Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan pengelolaan kinerja keuangan daerah yang optimal seperti efektivitas dalam penggunaan pengeluaran dan efisiensi pendapatan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Pambudi (2013) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Model yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori pertumbuhan neo klasik yang dikemukakan oleh Solow, faktor modal dan tenaga kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aglomerasi memiliki efek negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi memiliki efek positif dan signifikan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, variabel tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan variabel modal manusia berpengaruh positif tetapi

tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Tahaa, dkk (2010) hasil yang diperoleh bahwa dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan melalui investasi swasta. Dana transfer pusat tersebut dialokasikan pada pembiayaan infrastruktur ekonomi yang pada akhirnya menunjang kegiatan investasi swasta.

Penelitian yang dilakukan oleh Pahlavani, et al (2011) ditemukan hubungan kointegrasi antara pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah dengan menerapkan uji panel kointegrasi. Pemerintah membuat keputusan pengeluaran dan pendapatan secara bersamaan. Dalam skenario ini otoritas fiskal negara-negara ini dengan defisit anggaran harus meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran secara bersamaan dalam rangka untuk mengendalikan anggaran defisit mereka. Mubaroq, dkk (2013) mengungkapkan bahwa investasi pemerintah, jumlah tenaga kerja dan desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sama dengan Prakosa (2004) menyatakan bahwa secara empiris besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat.

Hubungan Antar Variabel

Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal

Menurut Halim (2007) Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. Kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut “KKD”) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Saat ini kondisi kemandirian Pemerintah Daerah belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Saliman (2016), kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kota di Pulau Sumatera masih sangat rendah, hal ini memperlihatkan bahwa daerah Kabupaten di Pulau Sumatera masih sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat. Utomo (2012) dalam Suwandi (2015), mengindikasikan kurang seriusnya daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dengan lebih mengandalkan penerimaan DAU yang bersifat hibah. Sebagai pertimbangan praktis, upaya ini lebih dipilih daripada meningkatkan PAD secara signifikan. Dinarossi (2016) menyatakan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja Modal.

Berdasarkan hubungan antar variabel menghasilkan hipotesis sebagai berikut: H1 : Kemandirian Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Modal.

Efektivitas Keuangan Dengan Belanja Modal

Pemerintah dituntut untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Untuk mengetahui suatu kegiatan pemerintah apakah sudah terlaksana dengan efisien atau tidak, maka bisa dilihat dari efisiensi. Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Adanya desentralisasi fiskal mengharapkan setiap daerah untuk mampu mengelola keuangan daerahnya secara efektif dan efisien. Apabila pengeluaran daerah lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan daerah maka daerah tersebut dapat dikatakan efisien pada keuangan daerahnya. Semakin kecil nilai efisiensi berarti semakin efisien suatu daerah dan mengindikasikan pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Efisiennya suatu daerah diharapkan juga berdampak pada nilai pengalokasian Belanja Modalnya sebagai wujud pembangunan daerah. Berdasarkan hubungan antar variabel menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Efektivitas Keuangan Berpengaruh Terhadap Belanja Modal

Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Sularso dan Restianto (2011) menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Machmud, Kawung dan Rompas (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahunnya masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemandirian daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya. Kemandirian merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Berdasarkan hubungan antar variabel menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kemandirian Keuangan Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Efektivitas Keuangan Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Rasio efektivitas merupakan rasio derajat keberhasilan yang akan didapat dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Apabila daerah tersebut mampu untuk merealisasikan peningkatan PAD dengan pelayanan masyarakat yang optimal maka rasio efektivitas akan tinggi. Berdasarkan hubungan antar variabel menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Efektivitas Keuangan Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2010) secara spesifik menyebutkan ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga digunakan di antaranya untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di dalam sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi sehingga masyarakat pun turut menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor tersebut, produktivitas masyarakat pun menjadi semakin tinggi dan pada akhirnya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hubungan antar variabel menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal

Kemandirian merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Menurut Todaro (2010) secara spesifik menyebutkan ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah

daerah juga digunakan di antaranya untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di dalam sector pendidikan, kesehatan dan transportasi sehingga masyarakat pun turut menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Berdasarkan hubungan antar variabel menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Kemandirian Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal

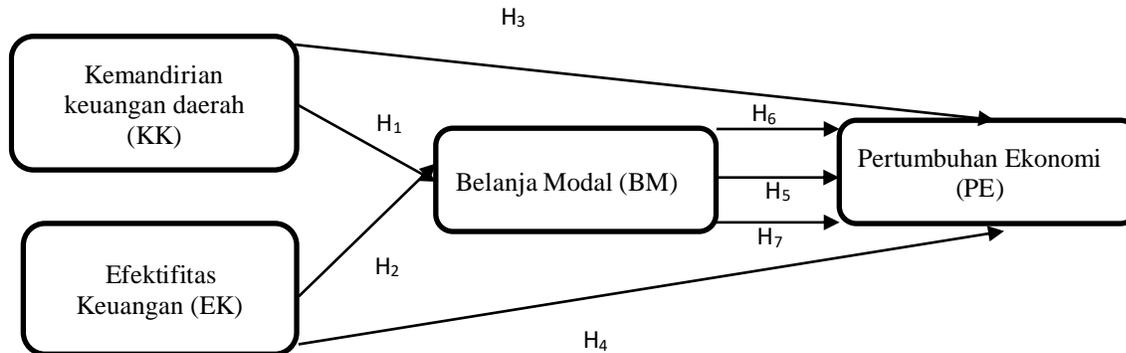
Efektivitas Keuangan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal

Rasio efektivitas merupakan rasio derajat keberhasilan yang akan didapat dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Apabila daerah tersebut mampu untuk merealisasikan peningkatan PAD dengan pelayanan masyarakat yang optimal maka rasio efektivitas akan tinggi. Menurut Todaro (2010) secara spesifik menyebutkan ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hubungan antar variabel menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H7 : Efektivitas Keuangan Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal

Kerangka Konseptual

Anggaran merupakan sebuah alat yang berpengaruh besar terhadap perencanaan suatu daerah maupun pengendalian pada organisasi pemerintah, karena sangat bergantung terhadap jumlah anggaran yang direalisasikan atau diberikan oleh Pemerintah, sehingga mampu terwujudnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan belanja modal dan anggaran belanja pada 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Penggunaan anggaran belanja pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip kemandirian keuangan daerah dan efektivitas keuangan anggaran belanja daerah yang dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah agar terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian ini memilih variabel belanja modal sebagai variabel intervening atau mediasi dikarenakan ingin mengukur penggunaan anggaran dalam bentuk pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbentuk fasilitas berupa sarana dan prasaranan, sehingga penggunaan anggaran tersebut termasuk kedalam belanja modal atau menjadi aset daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa kemandirian keuangan daerah (KK) dan efektivitas keuangan (EK) dianggap variabel bebas yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (PE) yang dapat dikatakan sebagai variabel terikat dan belanja modal (BM) sebagai variabel intervening seperti yang tergambar pada bagan berikut ini: dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam studi ini ditujukan untuk mendapatkan data sekunder. Menurut Komariah & Satori (2010:34) teknik pengumpulan yang digunakan melalui pengumpulan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur, hasil penelitian, dan data-data yang dikumpulkan merupakan data panel berupa Laporan Keuangan tahun 2012–2020 yang berasal dari BPS 14 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat meliputi data realisasi anggaran belanja, anggaran pendapatan dan target anggaran.

Populasi dan Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari suatu populasi. Sebagai bagian dari suatu populasi, sampel memberikan gambaran yang benar tentang populasi, Arikunto (2013). Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode sampling sensus, sampling sensus adalah keseluruhan sampel dijadikan sampel yaitu seluruh 14 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel pada penelitian menggunakan 4 variabel yang dijabarkan dengan definisi operasional disajikan tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Operasional Variabel	Satuan
Kemandirian Keuangan Daerah (KK)	Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Halim, 2010)	$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$
Efektivitas Keuangan (EK)	Efektivitas keuangan merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan (Halim, 2010)	$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Anggaran\ Pendapatan} \times 100\%$
Belanja Modal (BM)	Belanja modal adalah pengeluaran Negara yang digunakan dalam rangka pembentukan modal atau aset untuk operasional sehari-hari dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Todaro, 2010)	Dalam rupiah
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Sukirno, 2010)	$Gt = ((PBDt - PBDt-1) / PBDt-1) \times 100\%$

Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah pertama dengan melakukan perumusan masalah dan identifikasi masalah, kedua melakukan pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan sekunder, ketiga melakukan verifikasi data yang sudah terkumpul, keempat dilakukan pengolahan data secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Analisis Jalur

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *path analysis*. Untuk menentukan besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya Koefisien path dapat dihitung dengan langkah kerja sebagai berikut; pertama, gambarkan diagram path untuk hubungan-hubungan variabel secara lengkap yang mencerminkan hipotesis konseptual yang diajukan. Kemudian hitung besarnya pengaruh (parameter struktural) antara suatu variabel penyebab dengan variabel akibat. Perhitungan ini didasarkan pada sub struktur hubungan antara k buah variabel penyebab dengan sebuah variabel akibat. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *path analysis* dengan persamaan sebagai berikut:

Sub Struktur I : $BM = P_1KK + P_2EK + e_1$

Sub Struktur II : $PE = P_1KK + P_2EK + P_3BM + e_2$

Dimana :

PE = Pertumbuhan Ekonomi Daerah

- BM = Belanja Modal
 KK = Kemandirian Keuangan Daerah
 EK = Efektivitas Keuangan
 P_{123} = Koefisien (parameter taksiran)
 e = Error Term

Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh hasil/nilai yang tidak bias atau estimator linear tidak bias yang terbaik, maka model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan asumsi klasik. Asumsi klasik dengan melakukan: Uji Normalitas, digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak.; dan Uji *Linearitas*, dilakukan dengan mencari persamaan regresi variabel bebas x terhadap variabel terikat y. Berdasarkan garis regresi yang telah dibuat, selanjutnya diuji keberartian koefisien garis regresi serta linearitasnya.

Uji Hypotesis

Untuk melakukan pembuktian terhadap hipotesis yang dibuat dalam penelitian maka dilakukan uji parsial dan simultan pada model regresi yang digunakan dalam penelitian, yaitu Uji t, untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F, dilakukan pengujian secara normatif menggunakan pengujian satu arah yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel-variabel *independen* terhadap variabel *dependen*, dan Uji Koefisien Determinasi (R^2), mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independent.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis statistik yang memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), maximum, dan minimum. Secara lengkap hasil analisis statistik dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	126	1.08E8	7.21E8	2.8399E8	1.15121E8
KK	126	1.28	67.73	9.8596	8.85363
EK	126	1.43	68.95	9.8536	8.82387
PE	126	-3.96	7.97	4.6174	2.36882
Valid N (listwise)	126				

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 1, dapat dikatakan bahwa statistik deskriptif dengan jumlah sampel 126 data, variabel BM memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 1,080 pada Kabupaten Sanggau tahun 2012 dan nilai terbesar (maksimum) 7,210 pada Kabupaten Ketapang tahun 2020. Rata-rata yang dimiliki 126 data menunjukkan hasil sebesar 2,83 dengan nilai standar deviasi BM adalah sebesar 1,151 (rata-rata), artinya BM memiliki tingkat variasi data yang cukup tinggi. Variabel KK memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 1,28 pada Kabupaten kayong Utara tahun 2015 dan nilai terbesar (maksimum) 67,73 pada Kota Pontianak tahun 2012. Rata-rata yang dimiliki 126 data

menunjukkan hasil sebesar 9,859 dengan nilai standar deviasi adalah sebesar 8,853 (rata-rata), artinya KK memiliki tingkat variasi data yang cukup tinggi.

Variabel EK memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 1,43 pada Kabupaten kayong Utara tahun 2013 dan nilai terbesar (maksimum) 68,95 pada Kota Pontianak tahun 2012. Rata-rata yang dimiliki 126 data menunjukkan hasil sebesar 9,853 dengan nilai standar deviasi adalah sebesar 8,823 (rata-rata), artinya EK memiliki tingkat variasi data yang cukup tinggi. Variabel PE memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar -3,96 pada Kota Pontianak tahun 2020 dan nilai terbesar (maksimum) 7,97 pada Kabupaten Ketapang tahun 2016. Rata-rata yang dimiliki 126 data menunjukkan hasil sebesar 4,617 dengan nilai standar deviasi adalah sebesar 2,368 (rata-rata), artinya PE memiliki tingkat variasi data yang cukup tinggi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengaruh Kemandirian dan Efektivitas keuangan Terhadap Belanja Modal (sub struktur I)

Hasil model regresi akan menunjukkan ada tidaknya pengaruh dan bagaimana pengaruh dari setiap variabel *independen* yang terdiri atas Kemandirian keuangan (KK) dan Efektivitas keuangan (EK) terhadap variabel *dependen* yaitu Belanja Modal (BM).

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Sub Struktur I

Variabel	Standard Koefisien Beta	Sig t
<i>Kemandirian Keuangan (KK)</i>	0,463	0,000
<i>Efektivitas Keuangan (EK)</i>	0,234	0,042
R Square (R ²)	0,320	
Sig F	0,000	

a. Predictors: (Constant) X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Koefisien regresi variabel Kemandirian Keuangan (KK) bernilai positif 0,463, hal ini menunjukkan Kemandirian keuangan pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dilihat dari angka signifikansinya dimana nilai sig $0,000 < 0,05$ maka dapat diartikan bahwa variabel Kemandirian Keuangan (KK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (BM) berarti H1 didukung atau terbukti.

Koefisien regresi variabel Efektivitas Keuangan (EK) bernilai positif 0,234, hal ini menunjukkan Efektivitas Keuangan berhubungan positif terhadap Belanja Modal. Dilihat dari angka signifikansinya dimana nilai sig $0,042 < 0,05$ maka dapat diartikan bahwa variabel Efektivitas Keuangan (EK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (BM) berarti H2 didukung atau terbukti.

Pengaruh Kemandirian, Efektivitas keuangan dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (sub struktur II)

Hasil model regresi akan menunjukkan ada tidaknya pengaruh dan bagaimana pengaruh dari setiap variabel independen yang terdiri atas Kemandirian Keuangan (KK), Efektivitas Keuangan (EK) dan Belanja Modal (BM) terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE).

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Sub Struktur II

Variabel	Standard Koefisien Beta	Sig t
<i>Kemandirian Keuangan (KK)</i>	0,223	0,017
<i>Efektivitas Keuangan (EK)</i>	0,437	0,000
Belanja Modal (BM)	0,407	0,000
R Square (R^2)	0,668	
Sig F	0,000	

a. Predictors: (Constant), Y, X2, , X1

b. Dependent Variable: Z

Sumber : Hasil pengolahan Data Primer, 2022

Koefisien regresi variabel Kemandirian Keuangan (KK) bernilai positif 0,223, hal ini menunjukkan Kemandirian keuangan berhubungan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi . Dilihat dari angka signifikansinya dimana nilai sig 0,017 < 0,05 maka dapat diartikan bahwa variabel Kemandirian Keuangan (KK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) berarti H3 didukung atau terbukti.

Koefisien regresi variabel Efektivitas Keuangan (EK) bernilai positif 0,437, hal ini menunjukkan Efektivitas keuangan berhubungan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi . Dilihat dari angka signifikansinya dimana nilai sig 0,000 < 0,05 maka dapat diartikan bahwa variabel Efektivitas Keuangan (EK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) berarti H4 didukung atau terbukti.

Koefisien regresi variabel Belanja Modal (BM) bernilai positif 0,407, hal ini menunjukkan Belanja Modal berhubungan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi . Dilihat dari angka signifikansinya dimana nilai sig 0,000 < 0,05 maka dapat diartikan bahwa variabel Belanja Modal (BM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) berarti H5 didukung atau terbukti.

Peran Mediasi Belanja Modal Pengaruhi *Kemandirian* dan Efektivitas keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil dari perhitungan koefisien jalur pada sub struktur I, sub struktur II dapat digambarkan secara keseluruhan hubungan kausal empiris antara variabel. Untuk menilai kebaikan model riset dapat diketahui melalui koefisien determinasi total sebagai berikut :

Peran variabel mediasi pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan uji sobel. Uji Sobel (Sobel Test). Uji Sobel ini dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen (X) kepada variabel dependen (Y) melalui variabel intervening (M). Berdasarkan persamaan sub struktur I dan persamaan sub struktur II diperoleh rekapitulasi pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total dari hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 4
Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung Dan Pengaruh Total

No	Keterangan Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh Total
1.	KK → PE	$0,223^2 \times 100\% = 4,97\%$		
2.	KK → BM → PE		$(0,463 \times 0,407) \times 100\% = 18,84\%$	$(4,97 + 18,84) = 23,81\%$
3.	EK → PE	$0,437^2 \times 100\% = 19,09\%$		
4.	EK → BM → PE		$(0,234 \times 0,407) \times 100\% = 9,52\%$	$(19,09 + 9,52) = 28,61\%$

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer 2021

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa pengaruh langsung *Kemandirian Keuangan* (KK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebesar 4,97%, sedangkan pengaruh tidak langsung *Kemandirian Keuangan* (KK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) melalui Belanja Modal (BM) sebesar 18,84%. Besarnya pengaruh tidak langsung lebih besar daripada pengaruh langsung, artinya untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi lebih diutamakan dengan memperhatikan variabel Belanja Modal, dengan demikian pengaruh total *Kemandirian Keuangan* (KK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) yang dimediasi oleh Belanja Modal (BM) adalah sebesar 23,81%. Hal ini berarti H6 adalah terbukti.

Pengaruh langsung *Efektivitas Keuangan* (EK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebesar 19,04%, sedangkan pengaruh tidak langsung *Efektivitas Keuangan* (EK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) melalui Belanja Modal (BM) sebesar 9,52%. Pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung, artinya untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi lebih diutamakan dengan memperhatikan variabel Efektivitas Keuangan, dengan demikian pengaruh total *Efektivitas Keuangan* (EK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) yang dimediasi oleh Belanja Modal (BM) adalah sebesar 28,61% Hal ini berarti H7 didukung atau terbukti.

Pembahasan

Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh dari *Kemandirian Keuangan* (KK) terhadap Belanja Modal (BM). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas *Kemandirian Keuangan* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (probabilitas <0,05) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Kemandirian Keuangan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pengaruh positif artinya dengan adanya peningkatan *Kemandirian Keuangan* akan memberikan dampak terhadap meningkatnya Belanja Modal. Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Winny (2013) dan Dwi (2016) yang menyatakan bahwa *Kemandirian Keuangan* memberikan dampak terhadap Belanja Modal.

Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh dari *Efektivitas Keuangan* (EK) terhadap Belanja Modal (BM). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas *Efektivitas Keuangan* sebesar 0,042 lebih kecil dari 0,05 (probabilitas <0,05) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Efektivitas Keuangan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pengaruh positif artinya dengan adanya peningkatan *Efektivitas Keuangan* akan memberikan dampak terhadap meningkatnya Belanja. Hasil penelitian

mendukung penelitian Auh (2005) dan Kim dan Smith (2006) yang menyatakan bahwa *Efektivitas Keuangan* berpengaruh kuat terhadap Belanja Modal.

Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh dari *Kemandirian Keuangan* (KK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas *Kemandirian*, *Efektivitas Keuangan* dan Belanja Modal sebesar 0,017 lebih kecil dari 0,05 (probabilitas < 0,05) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Kemandirian Keuangan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pengaruh positif artinya dengan adanya peningkatan *Kemandirian Keuangan* pada setiap akan memberikan dampak terhadap meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian mendukung studi terdahulu yang dilakukan oleh Indahwati (2013) dan Badr (2016) yang menyatakan bahwa *Kemandirian Keuangan* berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh dari *Efektivitas Keuangan* (EK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas *Efektivitas Keuangan* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (probabilitas < 0,05) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Efektivitas Keuangan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pengaruh positif artinya dengan adanya peningkatan *Efektivitas Keuangan* akan memberikan dampak terhadap meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian mendukung penelitian Auh (2005) dan Kim dan Smith (2006) yang menyatakan bahwa *Efektivitas Keuangan* berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh dari Belanja Modal (BM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas Belanja Modal sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (probabilitas < 0,05) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pengaruh positif artinya dengan adanya peningkatan Belanja Modal akan memberikan dampak terhadap meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Waseso (2008) dan Siwantara (2011), yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil pengujian menunjukkan pengaruh tidak langsung *Kemandirian Keuangan* terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui perantara Belanja Modal lebih kuat pengaruhnya sebesar 18,84% dibandingkan dengan pengaruh langsung *Kemandirian Keuangan* terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,97% sehingga didapat besarnya pengaruh total *Kemandirian Keuangan* terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 23,81% yang menyatakan bahwa *Kemandirian Keuangan* berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Artinya pada penelitian ini variabel mediasi atau perantara kurang memberikan pengaruh dikarenakan nilai pengaruh taklangsung nya lebih besar dari pada nilai pengaruh langsungnya, sehingga untuk pengaruh Belanja Modal yang memediasi pengaruh *Kemandirian Keuangan* terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedikit memberikan pengaruh yang berarti di dalam model penelitian. Hal ini mendukung penelitian Indahwati (2013) dan Badr (2016).

Hasil pengujian menunjukkan nilai pengaruh tidak langsung *Efektivitas Keuangan* terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui perantara Belanja Modal lebih kecil pengaruhnya sebesar 9,52% dibandingkan dengan pengaruh langsung *Efektivitas Keuangan* terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 19,09% sehingga didapat besarnya pengaruh total *Efektivitas Keuangan* terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 28,61% menyatakan bahwa *Efektivitas Keuangan* berpengaruh

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Artinya pada penelitian ini variabel mediasi atau perantara kurang memberikan pengaruh dikarenakan nilai pengaruh tak langsungnya lebih kecil dari pada nilai pengaruh langsungnya. Hasil ini mendukung studi terdahulu penelitian Auh (2005) dan Kim dan Smith (2006).

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah, dan efektivitas keuangan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada 14 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian Keuangan daerah, efektivitas Keuangan, dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 14 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat. Selanjutnya pengaruh tidak langsung *Efektivitas Keuangan* terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui perantara Belanja Modal lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung *Efektivitas Keuangan* terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil penelitian ini dapat memperjelas gambaran tentang pertumbuhan ekonomi, dimana dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah pertama dengan meningkatkan sumber pendapatan daerah dari sektor pajak dan menambah target retribusi yang masih belum mencapai target, sehingga tercapai kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di daerah. Kedua dengan adanya monitoring secara berkala dalam penggunaan anggaran. Ketiga dengan melakukan evaluasi untuk setiap belanja modal yang dibelanjakan pada setiap tahun anggaran sehingga pengelolaan dari belanja modal digunakan tepat sasaran untuk mendukung meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

REFERENSI

Rahardjo, A. (2013). *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asih, S. (2018). *Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, ISSN 2087-4669. Sumatera Utara.

Azhari, M., Zulfa, A. & Murtala. (2020). *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*. *Jurnal ISSN.2503.4367*. Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.

Boediono. (1985). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.

Boediono. (2014). *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.

Dumairy. (2004). *Perekonomian Indonesia. Cetakan Kelima*. Jakarta: Penerbit Erlangga.



- Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidh, A.A. (2013). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. & Kusufi, M. S. (2010). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariato, D. & Adi, P.H. (2007). *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita*. Makasar: Simposium Nasional Akuntansi X.
- Jhingan, M. L. (2008). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komariah, A. & Satori, D. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Mangkoesebroto, G. (2016). *Ekonomi Publik. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPF
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kemendagri.
- Mubaroq, M. R., Remi, S.S dan Muljarijadi, B. (2013). *Pengaruh Investasi Pemerintah, Tenaga Kerja dan Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Indonesia Tahun 2007-2010*. Bappeda: Cimahi.
- Munandar, M. (2010). *Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja*. Yogyakarta: BPF
- Nafarin, M. (2010). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muana, N. (2005). *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Pahlavani, M. dkk. (2011). *Government Revenue And Government Expenditure Nexus In Asian Countries: Panel Cointegration And Causality Mohsen Mehrara Faculty of Economics*.



- Pambudi, E.W. (2013). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Prakosa, K.B. (2004). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*. JAAI VOLUME 8 NO. 2, ISSN: 1410 – 2420. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Saraswati, D. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*. Sumatera Utara.
- Saraswati, D. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi Di Kabupaten/Kota Sumatera Utara*. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*. Sumatera Utara.
- Saraswati, D. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*. Sumatera Utara.
- Siregar, O.K. (2018). *Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Rasio Pemerintah Kota Medan*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*. ISSN 2087-4669. Medan.
- Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Sukirno, S. (2010). *Makro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tahaa, Y.R, Agussalim & Nursini. (2010). *Kajian Pengaruh Dana Dana Transfer Pusat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tengah*. Sulawesi Tengah.
- Tarigan, R. (2004). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Todaro, M.P. dan Smith, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan. Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M.P. dan Smith, S. C. (2010). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.